bank pinar
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Jl. K.H Hasyim Ashari, Ruko Pinang Griya Permai
No. 10-11 Pinang, Kota Tangerang 15145
(021) 731-0442, (021) 730-8576
(021) 730-8576
infopusat@bprpinangartha.com

Tangerang, 26 Maret 2025

No. : 058/DIR/Pinar-DPP/III/2025

Kepada Yth,
DPP Perbarindo & Media BPR 2
Komplek Patra II No.46
Jl. Jendral Ahmad Yani, Bypass
Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan GCG BPR Pinang Artha Tahun 2024 melalui SIP Perbarindo**

Dengan Hormat,
Menunjuk pada surat DPP Perbarindo nomor 0115/DPP-Perbarindo/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Himbauan Pelaporan GCG BPR kepada Perbarindo dan Majalah Media BPR, berikut kami kirimkan Laporan GCG BPR Pinang Artha tahun 2024 melalui SIP Perbarindo.

Demikian laporan ini kami sampaikan beserta lampirannya dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR PINANG ARTHA

bank pinar
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

(Elmiko Sarirahmadhoni)
Direktur Utama

Cc.
1. Dewan Komisaris
2. Arsip

bank pinar
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

TAHUN 2024

DIBUAT OLEH :

PT BPR PINANG ARTHA

Jl. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai No. 10-11 Pinang,
Kota Tangerang 15145

(021) 731 0442 / (021) 730 8576 0877 5890 0313

DAFTAR ISI LAPORAN TATA KELOLA
BPR PINANG ARTHA
PERIODE TAHUN 2024

COVER 1
DAFTAR ISI 2
BAB I **PENDAHULUAN** 3
A KATA PENGANTAR DIREKSI 3
B PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 3
BAB II **POKOK LAPORAN** 4
A RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA 4
B PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA 4
C KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR 12
D KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN 12
E HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR 13
F HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR 14
G PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS 14
H RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH 15
I PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN 15
J KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEKOM 18
K JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) 18
L PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI 19
M TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN 20
N PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN 20

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
PT. BPR PINANG ARTHA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. KATA PENGANTAR DIREKSI

Pada tahun 2024 dan kedepannya, BPR Pinang Artha bertekad untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola kami agar selaras dengan praktik terbaik dalam menjalankan perusahaan dan persyaratan regulasi. Kami berfokus pada penguatan kontrol internal, peningkatan proses manajemen risiko, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan dengan integritas tertinggi dan hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan dan masyarakat sekitar kantor BPR Pinang Artha beroperasi.

Komponen penting dari komitmen tata kelola yang dijalankan oleh BPR Pinang Artha adalah faktor kepercayaan yang kami masukkan dalam perencanaan strategis dan operasional. Kami menempatkan berkelanjutan sebagai bagian dari inti dibisnis kami, memastikan bahwa tindakan kami memberikan kontribusi positif terhadap lanskap ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup penilaian risiko persaingan usaha yang ketat, inisiatif keuangan berkelanjutan dan fokus nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan kami.

Dalam semua upaya kami, BPR Pinang Artha tetap berfokus untuk melayani kepentingan para pemangku kepentingan secara luas dengan melakukan transparansi, praktik bisnis yang beretika dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan dan perlunya adaptasi terhadap tantangan dan peluang dimasa depan, komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang kuat akan tetap terjaga menjadi panduan kami dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan tangguh serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Di BPR Pinang Artha, kami sangat berkomitmen untuk menegakkan standar tertinggi tata kelola perusahaan sebagai bagian dari landasan utama operasional kami. Komitemen ini didorong oleh keyakinan yang kuat bahwa praktik tata kelola yang kokoh adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan membangun budaya transparansi serta akuntabilitas diseluruh organisasi perusahaan.

B. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, BPR Pinang Artha berpegang pada prinsip-prinsip dasar tata kelola sesuai pedoman GCG yaitu Perilaku beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan berkelanjutan.

BAB II
POKOK LAPORAN

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. KH Hasyim Ashari, Ruko Pinang Griya Permai nomor 10-11 Kel. Pinang Kec. Pinang Kota Tangerang
Nomor Telepon	021 - 7310442
Penjelasan Umum	Tata kelola di BPR Pinang Artha telah berjalan dengan baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Standar Operasional Prosedur telah ada dan dilakukan oleh setiap unit kerja.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Penerapan Tata Kelola di BPR Pinang Artha sudah berjalan baik dan benar tetapi tetap harus ditingkatkan. Masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan tetapi pelanggaran tersebut tidak signifikan dan berpengaruh terhadap keuangan BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	-
	Nama	Elmiko Sarirahmadhoni
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. - Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan

		RUPS. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. - Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
2	NIK*)	-
	Nama	Rachmat Hidayat
	Jabatan	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	- Mengelola divisi Bisnis sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD ART, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). - Menyusun RBB, Target Jualan per bulan secara grup, Target per bulan secara perorangan dan serta rencana strategis Bisnis Perseroan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. - Menyusun rencana kerja tahunan untuk diajukan kepada Direktur Utama dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. - Bersama Direktur Utama menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Pemegang Saham.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***)		Rekomendasi dari Dewan Komisaris telah dilakukan dan dilaporkan kembali.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	-
	Nama	Ismundarti
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : 1) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 2) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. d. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap : 1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan 2) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat. e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : 1) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau

		pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan 2) Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
2	NIK*)	-
	Nama	Laksmi Indira K.
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	Membantu Komisaris Utama untuk : a. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. b. Dalam melaksanakan pengawasan, untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. c. Dalam melaksanakan pengawasan, mengingatkan Komisaris Utama bahwa dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : 1) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 2) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. d. Turut melakukan pengawasan terhadap : 1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan 2) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat.

		e. Turut melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : 1) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan 2) Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
Rekomendasi kepada Direksi		Sepanjang 2024 Rekomendasi diberikan melalui Rapat Dekom & Rapat Pengurus. 1) Manajemen Perkreditan : Kelola kredit dengan mitigasi risiko: analisa kredit cermat memadai, tagih & pantau kredit, atasi potensi masalah & NPL. Jaga kolektibilitas, perhatikan risiko konsentrasi kredit; sebaran merata & risiko terbagi atas jenis-jenis kredit: perorangan, UMKM, channeling (koperasi), sindikasi, dll. Buat action plan kredit bermasalah, lakukan strategi pengendalian kenaikan NPL, optimalisasi penagihan & kerjasama jasa penagih hutang didukung pengawasan manajemen. 2) Beban Biaya, Laba & Pendapatan : Upayakan kenaikan laba bank dengan strategi penyaluran kredit & pemasaran efektif efisien. Imbangi ekspansi kredit besar dengan kenaikan DP3, jaga likuiditas. Jaga BOPO, perhitungkan biaya marketing dengan reward yang akan didapat. Lakukan program pemasaran sejalan kegiatan inklusi, edukasi literasi. 3) GRC : Terapkan Tata Kelola, MR & Kepatuhan secara baik & konsisten. Identifikasi, ukur, pantau & kelola risiko melalui pengendalian internal benar & baik. Pahami peraturan & ketentuan baru OJK (penerapan SAK EP & CKPN), LPS, perpajakan, dll. Ikuti sosialisasi & pelatihan yang diperlukan agar menguasai aturan & ketentuan baru & cara penyampaian laporan agar tidak terkendala

	dalam pelaksanaan sebagai panduan & acuan berjalannya bisnis perusahaan. Pengkinian SOP secara rutin, benahi & lengkapi SOP yang harus ada. 4) Audit Internal : Pastikan pelaksanaan audit berpedoman SEOJK & sesuai rencana kerja audit. Tingkatkan kapasitas & kualitas auditor internal. Atasi masalah fraud; kendalikan melalui cegah, deteksi dini, pantau & ambil tindakan. Internalisasi nilai-nilai JuBerDiRut pada organisasi. 5) SDM & Pelatihan : Penilaian kinerja karyawan untuk pemetaan SDM yang baik & benahi struktur organisasi ringkas, efektif efisien. Lakukan tahapan & proses perekrutan SDM secara benar & berkualitas. Sosialisasikan program KPI. Tingkatkan produktivitas SDM. Cek karakter SDM (hindari judol & fraud).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1	**Komite Audit**	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
2	**Komite Pemantau Risiko**	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
3	**Komite Remunerasi dan Nominasi**	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
4	**Komite Manajemen Risiko**	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-

	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
5	**Komite Kredit**)**	
	Tugas dan Tanggung Jawab	Meninjau, menilai dan memutuskan permohonan pembiayaan untuk calon Debitur, serta menilai manajemen risiko dari kredit tersebut.
	Program Kerja	Menciptakan kredit yang sehat sesuai dengan Tata kelola yang baik.
	Realisasi	Setiap ada pengajuan kredit
	Jumlah Rapat	Sepanjang tahun

Keterangan :
Untuk komite lainnya belum ada karena BPR Pinang Artha dengan modal inti masih dibawah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

''BAGIAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN''

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK*)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Kredit	
1	-	Rachmat Hidayat	Dir. Bisnis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Ketua	Tidak
2	-	Rachmat Nur Subhi	Kepala Cabang Bogor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
3	-	Dyah Rosanna	Kepala Bagian Kredit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
4	-	Jumadi	AO Kredit Pusat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
5	-	Taufik Qurrahman	AO Kredit Cabang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
6	-	Ardiansyah Murdiana	Analis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Anggota	Tidak
7	-	Elmiko Sarirahmadhoni	Dir. Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pengamat ≥ 100 juta	Tidak
8	-	Ismundarti	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pengamat ≥ 350 juta	Tidak
9	-	Laksmi Indira K.	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pengamat ≥ 350 juta	Tidak
10	-	Joe Hendradjat	PE Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Pengamat ≥ 100 juta	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	-	Elmiko Sarirahmadhoni	2.804.500.000	23,37%	2.804.500.000	23,37%
2	-	Rachmat Hidayat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	-	Ismundarti	450.000.000	3,75%	450.000.000	3,75%
2	-	Laksmi Indira K.	524.500.000	4,37%	524.500.000	4,37%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*) /**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Rachmat Hidayat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Ismundarti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Laksmi Indira K.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak ada	Tidak ada	Orang Tua
2	-	Rachmat Hidayat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ismundarti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Laksmi Indira K.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak ada	Tidak ada	Ibu dan Kakak
2	-	Rachmat Hidayat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ismundarti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Laksmi Indira K.	Tidak ada	Tidak ada	Mertua

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	2	64.030.000	2	28.066.500
2	Tunjangan	2	7.643.000	1	3.440.747
3	Tantiem	–	–	–	–
4	Kompensasi berbasis saham	–	–	–	–
5	Remunerasi lainnya**)	–	–	–	–
Total Remunerasi			71.673.000		31.507.247
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	–	–	–	–

2	Transportasi	2	7.000.000	–	–
3	Asuransi kesehatan	–	–	–	–
4	Fasilitas lainnya***)	–	–	–	–
Total Fasilitas Lain			7.000.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			78.673.000		0

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan **) (a / b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 ¾ : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 ¼ : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 ¾ : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 ¼ : 1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	20 Februari 2024	2	• **Realisasi RASIO posisi Januari 2024**: Faktor Permodalan (KPMM 57,96%, Modal Inti 57,37%, MIAPB 226,56%), Faktor Kualitas Aset (KAP 12,14%, PPAP 100%), Faktor Rentabilitas (ROA 1,42%, BOPO 90,50%, NIM 8,36%), Faktor Likuiditas (CR 9,66%, LDR 112,24%) • **Pencapaian terhadap RBB posisi Januari**: Laba 25,32% , KYD 94,05%. • **Rasio NPL Januari** 18,97%. • Audit OJK 2023 masih terdapat PR yang wajib disampaikan terkahir Februari 2024 tentang rangkap jabatan HRD • APU PPT

			• RBB 2024 • Rencana RUPS di 2024
2	20 Mei 2024	2	• **Realisasi RASIO posisi April 2024**: Faktor Permodalan (KPMM 55,48%, Modal Inti 55,44%, MIAPB 272,56%), Faktor Kualitas Aset (KAP 11,29%, PPAP 100%), Faktor Rentabilitas (ROA 2,02%, BOPO 87,47%, NIM 7,23%), Faktor Likuiditas (CR 13,48%, LDR 133,89%) • **Pencapaian terhadap RBB posisi April**: Laba 55,79% , KYD 79,10%. • **Rasio NPL April** 15,43%. • APU PPT • Sosialisasi RBB: dilakukan Kick off Meeting di bulan Maret • RUPST dan RUPSLB 2024 terselenggara baik di April • Kewajiban Pelaporan OJK • Kewajiban terhadap LPS • SDM adanya karyawan resign, mutasi dan HRD baru per Mei. • Temuan Audit Internal • GRC – Tata Kelola, ManRisk, Kepatuhan. Cermati peraturan baru yang hadir. • Upaya optimalisasi Kantor Cabang. • Tantangan BPR masa depan. • Hari BPR Nasional 2024
3	23 Agustus 2024	2	• **Realisasi RASIO posisi Juli 2024**: Faktor Permodalan (KPMM 46,47%, Modal Inti 45,66%, MIAPB 327,36%), Faktor Kualitas Aset (KAP 9,49%, PPAP 100%), Faktor Rentabilitas (ROA 2,75%, BOPO 83,67%, NIM 7,26%), Faktor Likuiditas (CR 11,63%, LDR 133,12%) • **Pencapaian terhadap RBB posisi Juli**: Laba 58,49% , KYD 89,61%. • **Rasio NPL Juli** 12,20%.

			• SDM baru per Juni Kacab Bogor, per Juli AO dan Teller. • APU PPT • Temuan Audit Internal. • Temuan Audit Ekternal OJK (akhir Juli). • Kewajiban Pelaporan. • HUT Bank PinAr.
4	19 September 2024	2	• **Realisasi RASIO posisi Agustus 2024**: Faktor Permodalan (KPMM 45,32%, Modal Inti 44,54%, MIAPB 294,73%), Faktor Kualitas Aset (KAP 10,04%, PPAP 100%), Faktor Rentabilitas (ROA 2,89%, BOPO 82,78%, NIM 7,17%), Faktor Likuiditas (CR 10,86%, LDR 135,38%) • **Pencapaian terhadap RBB posisi Agustus**: Laba 63,06% , KYD 91,20%. • **Rasio NPL Agustus** 12,66%. • APU PPT • Temuan Audit Internal, kasus Fraud Shahirul Ambry. • Kewajiban Pelaporan. • BIK & GENCARKAN 2024. • Perlindungan Konsumen. • RBB.
5	10 Desember 2024	2	• **Realisasi RASIO posisi November 2024**: Faktor Permodalan (KPMM 42,31%, Modal Inti 41,55%, MIAPB 227,15%), Faktor Kualitas Aset (KAP 10,58%, PPAP 100%), Faktor Rentabilitas (ROA 3,21%, BOPO 81,58%, NIM 6,85%), Faktor Likuiditas (CR 11,70%, LDR 131,09%) • **Pencapaian terhadap RBB posisi November**: Laba 63,98% , KYD 95,00%. • **Rasio NPL November** 14,18%. • Membandingkan rata-rata rasio industri BPR Nasional Triwulan I dan II.

			• SDM peningkatan produktivitas dan efektivitas. SDM terkait POJK 12/2024 Strategi Anti Fraud: perlu Fraud Awareness Training 1x 1 tahun. SDM terkait POJK 15/2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank: perlu dipersiapkan unit kerja atau PE pencegahan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. • APU PPT : pelaksanakan Pelatihan APU PPT 7 Desember 2024 • Temuan Audit Internal dan AI terkait Audit Eksternal OJK wajib membuat Rencana Kerja Audit sesuai SEOJK. • RAKB 2025 dan persiapkan Laporan Keberlanjutan 2024 yang disampaikan April 2025. • RBB 2025, CKPN dan rencana RUPST di 2025. • Tantangan BPR di masa depan.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEKOM

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	Ismundarti	5	-	100
2	-	Laksmi Indira K.	5	-	100

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah penyimpangan Internal*) (1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh (satuan)							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	_	_	_	_	1	1	_	_
Telah Diselesaikan		_		_		Untuk tahun 2024 telah selesai		_

Dalam Proses Penyelesaian**)	_	_	_	_	_	Untuk tahun 2023 belum selesai,	_	_
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)		_		_		_		_
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	_	_	_	_	_	_	_	_

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2 Orang Nasabah	_
Dalam Proses Penyelesaian	2 Orang Nasabah	_
Total	2 Orang Nasabah	_

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR.

1. Ada Debitur menggugat kepengadilan Negeri Bekasi tentang pembuatan akta Hak Tanggungan yang menurut Debitur tidak sah karena kredit ini adalah fasilitas kredit channeling antara BPR dengan Koperasi. Dari hasil mediasi dan proses peradilan diperoleh informasi bahwa Debitur menggugat adalah untuk mengulur waktu karena Debitur tidak sanggup membayar/melunasi pinjaman tersebut. Debitur tidak ingin agunan di eksekusi lelang jika tidak sanggup membayar hutang sehingga mencari berbagai cara untuk membatalkan perjanjian kredit yang ada.

2. Ada pihak ketiga menggugat keabsahan agunan atas nama Debitur dengan alasan jual beli agunan tersebut sebelumnya tidak sah karena pihak ketiga tersebut merasa tidak ikut tanda tangan akta jual beli dan pada tahun 2019 pihak ketiga tersebut pernah menggugat Debitur, BPN dan BPR ke PTUN Bandung dan BPR menang hingga ke Makamah Agung karena dengan bukti yang ada jual beli antara penggugat dengan Debitur sah sacara hukum. Lalu pihak ketiga tersebut kembali melaporkan Notaris pembuat AJB tersebut ke Polda Metro Jaya atas kasus yang sama dan Notaris tidak terbukti melakukan hal yang salah sehingga Polda Metro Jaya tidak bisa berbuat apa-apa dan tahun 2024 kembali pihak ketiga tersebut kembali menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri untuk kasus yang sama dan hingga sekarang sedang dalam proses peradilan.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan/Rp)	Keterangan **)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP	Jumlah (Rp)
1	24 Agustus 2024	Satunan anak yatim sekitar kantor Pusat BPR	Dalam rangka ulang tahun BPR memberikan sumbangan kepada warga yang memiliki anak yatim sekitar kantor Pusat	Warga RT 001 sebanyak 10 orang dengan santunan @ Rp.150.000,00 per orang	-	Rp. 1.500.000,00

--oooOOOooo--

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR PINANG ARTHA
TAHUN 2024

Tangerang, 25 Maret 2025

Disetujui dan ditandatangani oleh:

(Elmiko Sarirahmadhoni)	(Ismundarti)
Direktur Utama	Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	**PT. BPR PINANG ARTHA**
Alamat	:	Jln. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai no. 10-11 Pinang - Tangerang
No Telp	:	021-7310442
Posisi Laporan	:	Tahun 2024
Modal Inti	:	13.723.608.724
Total Aset	:	70.082.236.026
Status Audit	:	Y
Bobot BPR	:	B
Nilai Komposit	:	2,084
Peringkat Komposit	:	2

KESIMPULAN
BPR Pinang Artha sudah melaksanakan semua ketentuan tentang BPR dan Tata Kelola dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin agar pelaksanaan Tata Kelola di BPR Pinang Artha dapat berjalan dengan baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Tangerang, 25 Maret 2025

(Elmiko Sarirahmadhoni)	(Ismundarti)
Direktur Utama	Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Pinang Artha

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

795274-1-TKBPRKA-R-A-20241231-010201-601144-24032025141711

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

joe@bprpinangartha.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-03-24 14:17:11

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.